

PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA DALAM MELAKUKAN POLITICAL LINKAGE PASCA ELEKTORAL DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-IHSAN KREBET BULULAWANG KAB MALANG

Ahmad Zaki Fadlur Rohman

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
ahmadzakifr@ub.ac.id

Abstrak

Dalam konteks demokrasi, proses politik tidak berhenti pada tahapan elektoral. Tantangan utama pasca pemilu adalah menjaga keterhubungan antara lembaga politik dan masyarakat agar terjalin ekosistem politik yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam membangun dan mempertahankan political linkage pasca elektoral di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Kabet, Bululawang, Kabupaten Malang. Melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahapan kegiatan meliputi need assessment, pelatihan tentang politik partisipatif, hak politik warga, serta optimalisasi teknologi dalam komunikasi politik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, dalam memperkuat relasi antara lembaga politik dan masyarakat. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam mendorong keberlanjutan komunikasi politik dan membangun kesadaran demokratis di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci:

political linkage; partisipasi politik; penguatan kapasitas

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi untuk menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan negara. Namun, proses demokratisasi tidak berhenti pada pemungutan suara, melainkan menuntut adanya kesinambungan relasi antara lembaga politik dan masyarakat setelahnya. Tantangan pasca pemilu kerap muncul dalam bentuk menurunnya partisipasi masyarakat, lemahnya komunikasi politik, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Kondisi ini dapat menyebabkan apatisisme politik dan polarisasi sosial yang menghambat perkembangan demokrasi yang sehat.

Konsep political linkage menjadi penting dalam menjawab tantangan tersebut. Keterhubungan politik yang baik antara lembaga politik dan masyarakat tidak hanya memperkuat representasi politik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga publik. Dalam konteks lokal, Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Kabet, Bululawang, sebagai bagian dari masyarakat pendidikan, memiliki

peran strategis dalam membangun kesadaran politik, khususnya bagi pemilih pemula. Para siswa yang telah memasuki usia 17 tahun berpotensi menjadi aktor politik baru yang kritis dan partisipatif, namun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang belum memahami hak politik dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga pendidikan dalam melakukan political linkage pasca elektoral. Penguatan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang menekankan pentingnya komunikasi politik inklusif, transparansi, serta pemanfaatan media digital. Berdasarkan kajian literatur seperti Dalton (2017), Levitsky & Ziblatt (2018), dan Mounk (2018), penguatan partisipasi politik dan komunikasi publik pasca pemilu merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi representatif. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun praktik politik yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada saat melaksanakan kegiatan pengabdian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan mitra, yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Kreet, menjadi subjek utama dalam proses identifikasi masalah, perencanaan solusi, hingga pelaksanaan kegiatan.

Tahapan kegiatan meliputi; 1) Tahap persiapan, tim melakukan need assessment melalui wawancara, observasi, dan focus group discussion (FGD) untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra serta merancang desain kegiatan. Hasil asesmen menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan rencana kegiatan.

2) Tahap pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan simulasi yang mencakup materi tentang rekognisi politik partisipatif, hak politik warga, dan pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi politik. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, brainstorming, serta problem solving-based learning. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran politik serta memperkuat kapasitas lembaga dalam menjaga keterhubungan dengan masyarakat.

3) Tahap evaluasi dan analisis data, evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta melalui survei dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan laporan pengabdian dan publikasi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Penguatan Kapasitas Lembaga dalam Melakukan Political Linkage Pasca Elektoral di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Kreet Bululawang Kabupaten Malang” dilaksanakan sebagai respon

terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pasca pemilu dan lemahnya kapasitas lembaga pendidikan dalam menjaga keterhubungan politik antara warga dan institusi politik. Kegiatan ini berfokus pada upaya memperkuat pemahaman dan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengembangkan komunikasi politik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama proses pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan need assessment dan focus group discussion (FGD) dengan guru serta siswa MTs Al-Ihsan untuk memetakan tingkat pemahaman awal terhadap isu partisipasi politik. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memahami politik sebatas proses elektoral dan belum melihat pentingnya keterlibatan warga pasca pemilu. Selain itu, lembaga mitra belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengembangkan kegiatan pendidikan politik secara sistematis. Kondisi ini memperkuat relevansi pelaksanaan pengabdian sebagai sarana peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus penanaman nilai-nilai demokratis sejak dini.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan simulasi, yang meliputi empat materi pokok: (1) rekognisi politik partisipatif, (2) hak politik warga negara, (3) hak akses terhadap dana publik, dan (4) penguatan komunikasi politik berbasis media digital. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, brainstorming, serta problem-based learning untuk mendorong partisipasi aktif peserta.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan

Hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan pada saat pra pelatihan dan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Perbedaan tersebut tercermin pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil observasi pra dan pasca pelatihan

Aspek Pengetahuan dan Sikap	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
Pemahaman tentang demokrasi dan pemilu	Hanya sebatas mengenal pemilu sebagai ajang memilih pemimpin, tanpa memahami dinamika pasca pemilu.	Meningkat, dengan pemahaman bahwa pemilu hanyalah pintu masuk, sementara pasca elektoral penting untuk memastikan aspirasi warga tersalurkan.
Peran lembaga pendidikan dalam politik	Mayoritas peserta menganggap politik bukan bagian dari ranah madrasah.	Peserta menyadari bahwa madrasah dapat berperan sebagai pusat literasi politik dan penghubung masyarakat dengan aktor politik.
Kesadaran tentang political linkage	Hampir tidak ada pemahaman; istilah linkage masih asing.	Peserta mampu menjelaskan linkage sebagai hubungan berkelanjutan antara masyarakat, lembaga, dan aktor politik setelah pemilu.
Keterampilan praktis literasi politik	Belum memiliki metode atau kegiatan khusus untuk mendukung literasi politik.	Mulai mampu merancang forum diskusi, simulasi pemilu, dan program kolaborasi dengan pemerintah desa.
Sikap terhadap politik	Politik dianggap hal yang rumit dan sering berkonotasi negatif.	Peserta lebih terbuka, memandang politik sebagai ruang partisipasi positif yang bisa dikelola secara sehat melalui madrasah.

Tahap evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula dan mendorong perubahan sikap dari pasif menjadi aktif. Guru dan pihak madrasah menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman nilai-nilai demokrasi dan partisipasi warga dalam pengawasan kebijakan publik. Sebagai tindak lanjut, MTs Al-Ihsan berkomitmen mengintegrasikan materi politik partisipatif dalam kegiatan ekstrakurikuler OSIS dan kegiatan keagamaan agar terbentuk budaya politik yang sehat di kalangan siswa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Penguatan Kapasitas Lembaga dalam Melakukan Political Linkage Pasca Elektoral di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Krebet Bululawang Kabupaten Malang telah mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan. Melalui pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan partisipatif, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan guru dan siswa sebagai pemilih pemula. Mitra mampu memahami pentingnya peran lembaga pendidikan dalam menjaga keterhubungan antara masyarakat dan lembaga politik setelah pemilu berlangsung.

Kegiatan ini menghasilkan perubahan nyata berupa terbentuknya forum siswa sebagai wadah pembelajaran politik di lingkungan madrasah dan meningkatnya kapasitas guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kegiatan ini mendorong munculnya sikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap proses politik di sekitar peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pelibatan langsung masyarakat pendidikan dalam proses pembelajaran politik berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi politik dan partisipasi pasca elektoral. Program ini dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lain dalam mengembangkan pendidikan politik berbasis partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Carothers, T., & Youngs, R. (2015). *The Complexities of Global Democracy*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Dalton, R. J. (2017). *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford University Press.
- Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra). *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing.
- Mounk, Y. (2018). *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Harvard University Press.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Suseno, Nuri. (2013). *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok: Puskapol FISIP UI
- Wahl, F. (2019). Political participation and economic development. Evidence from the rise of participative political institutions in the late medieval German Lands. In *European Review of Economic History*. <https://doi.org/10.1093/ereh/hey009>
- Or, M. H., & Berkovich, I. (2021). Participative decision making in schools in individualist and collectivist cultures: The micro-politics behind distributed leadership. *Educational Management Administration and Leadership*. <https://doi.org/10.1177/17411432211001364>